

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pernyataan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii
Intisari	xii
Abstract	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	20
C. Tujuan Penelitian	21
D. Keaslian Penelitian	21
E. Kegunaan Penelitian	32
1. Kegunaan Teoritis	32
2. Kegunaan Praktis	33
F. Cara Penelitian	33
1. Bahan/Materi penelitian	33
2. Data Penelitian	34
3. Lokasi	36
4. Cara Pengambilan Sampel	39
5. Responden dan Narasumber	40
6. Alat Pengumpulan Data	43
7. Cara Pengumpulan Data	43
8. Analisis Data	43
9. Penarikan Kesimpulan	44
G. Sistematika Disertasi	44
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	48
A. Hubungan Industrial Indonesia	48
B. Tinjauan Hubungan Kerja	55
1. Perjanjian Kerja	55
2. Pengupahan	63
3. Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	67
C. Tinjauan Hak Asasi Manusia (HAM), Hak Kesehatan Reproduksi dan Hak Reproduksi dan Keluarga Berencana	70
1. Hak Asasi Manusia (HAM)	70
2. Hak kesehatan Reproduksi dan Hak Reproduksi	78
3. Keluarga Berencana (KB)	84
D. Tinjauan Hak-hak Khusus Berkenaan Fungsi Reproduksi Bagi Pekerja Perempuan	87
1. Argumen Urgensi Pengaturan Hak Berkenaan Fungsi Reproduksi Bagi Pekerja Perempuan Dalam Peraturan Ketenagakerjaan	87
2. Hak-hak Khusus Berkenaan Fungsi Reproduksi Bagi Pekerja Perempuan	98

E. Tinjauan Hak Anak dalam Rangka Perlindungan anak	107
F. Tinjauan Perlindungan Hukum	108
G. Tinjauan Sistem Hukum Ketenagakerjaan	114
1. Pengertian Sistem Hukum	114
2. Sistem Hukum Ketenagakerjaan	116
3. Pengawasan Ketenagakerjaan	119
H. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	125
I. Nilai	126
BAB III. LANDASAN TEORI	133
A. Teori Dasar (<i>Grand Theory</i>)	133
1. Teori Negara Hukum	133
2. Teori Sistem	137
3. Teori <i>Equality</i> dan Non Diskriminasi	140
B. Teori Pendukung (<i>Middle Range Theory</i>): Teori Keadilan	146
C. Teori Terapan (<i>Applied Theory</i>) : Teori Perlindungan Hukum	151
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	153
A. Filosofi Yang Mendasari Pengaturan Hak-Hak Khusus Berkenaan Fungsi Reproduksi Bagi Pekerja Perempuan Dalam Peraturan Ketenagakerjaan	153
1. Pengaturan Sejak Setelah Masa Kemerdekaan- Sebelum Berlakunya UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	155
2. Perdebatan Dalam Risalah Penyusunan Naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan (RUU PPK)	175
3. Nilai-nilai yang Terkandung Dalam pengaturan Hak-Hak Khusus Berkenaan Fungsi reproduksi Bagi pekerja Perempuan Dalam Peraturan Ketenagakerjaan Indonesia	196
4. Nilai-nilai Pancasila Dalam Hak-Hak Khusus Berkenaan Fungsi Reproduksi Bagi Pekerja Perempuan	229
5. Pandangan Agama Terkait Pengaturan Hak-Hak Khusus Berkenaan Fungsi Reproduksi Bagi Perempuan	236
B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Khusus Berkenaan Fungsi Reproduksi Bagi Pekerja Perempuan Pada Sektor Industri Dalam Peraturan Ketenagakerjaan Indonesia dan Pelaksanaannya	246
1. Pelaksanaan Hak-Hak Khusus Berkenaan Fungsi Reproduksi Bagi Pekerja Perempuan Pada Sektor Industri	246
2. Kendala-kendala Bagi Pihak Pengawas Ketenagakerjaan Dalam Menegakan Peraturan Ketenagakerjaan di Wilayah DIY	311
3. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Khusus Berkenaan Fungsi Reproduksi Bagi Pekerja Perempuan Dalam Peraturan Ketenagakerjaan dan Pelaksanaannya.	328
C. Pengaturan Hak-Hak Khusus Berkenaan Fungsi Reproduksi Bagi Pekerja Perempuan Dalam Peraturan Ketenagakerjaan Dan Sistem Hukum Ketenagakerjaan Indonesia di Masa Mendatang	365
1. Pengaturan Hak-Hak Khusus Berkenaan Fungsi Reproduksi Bagi Pekerja Perempuan yang Ideal dalam Peraturan Ketenagakerjaan	366
2. Pengaturan Hak-Hak Khusus Berkenaan Fungsi Reproduksi Bagi Pekerja	

BAB V. PENUTUP	432
A. Kesimpulan	432
B. Saran	435
1. Bagi pemerintah	435
2. Bagi pengusaha	435
3. Bagi Pekerja	436
DAFTAR PUSTAKA	437